

## Pemilu 1992 Serta Implikasinya Terhadap OPP

Soemitro

**B**arangkali semua pihak setuju bahwa tahun 1993 sebagai tahun yang menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia selanjutnya. Dilihat dari segi proses, fungsi tahun 1993 erat hubungannya dengan pelaksanaan Pemilu 1992. Demikian pula dilihat dari segi pelaksanaan tugas pokok Parpol dan GOLKAR, selaku organisasi peserta Pemilu yang akan datang.

Tanpa disadari kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara bangsa Indonesia terus maju dengan mantap. Diawali dengan masa revolusi fisik, era pembangunan politik dengan corak menonjol "nation and character building", dan era Orde Baru yang bercorak awal pembangunan ekonomi.

Walaupun corak tiap-tiap era itu berbeda, tetapi ada kesamaan ciri yang dominan yaitu: ketiga-tiganya merupakan masa perintisan yang didasarkan pada metoda "trial and error". Hal tersebut terjadi karena banyak faktor, yang paling dominan adalah tidak tersedianya kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan perencanaan yang baik, akibat mendesaknya tan-

tangan yang menghendaki jawaban efektif. Terutama pada periode purna kegagalan kudeta PKI 1965 di mana masalah *security* dan politik menjadi kendala utama.

Sejak masa revolusi fisik, era pembangunan politik, dan era awal pembangunan ekonomi, bangsa Indonesia dapat dikatakan telah berjuang tanpa pengalaman yang memadai dalam membina kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Ibarat makhluk yang baru dilahirkan dan tumbuh berdasarkan naluri semata, maka waktu itu bangsa Indonesia memang tumbuh sebatas "naluri" yang haus akan kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan. Secara filosofis naluri itu tercakup dalam kelima sila Pancasila dengan kerangka pelaksanaan UUD '45 dan digerakkan oleh semangat perjuangan yang berkobar.

Dalam mencari sistem yang sesuai untuk mengimplementasikan naluri perjuangannya, bangsa Indonesia harus melalui revolusi fisik, pergulatan dengan berbagai ideologi, paham demokrasi dan sistem pemerintahan, guna menemukan apa yang disebut sistem nilai yang berdasarkan kepribadian sendiri. Proses itu telah mem-

bawa bangsa Indonesia secara fisik compang-camping meninggalkan kemelut kegagalan kudeta PKI yang menjadi kulminasinya; tetapi, di pihak lain proses itu juga membawa bangsa Indonesia ke puncak keberhasilan mental spiritual dan kehidupan ideologik: sadar dan yakin bahwa Pancasila dan UUD '45-lah merupakan jalan lurus untuk meraih cita-cita perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Keyakinan ini adalah kristalisasi dari pelajaran sejarah.

Dilihat dari perjalanan kehidupan bangsa sejak proklamasi 1945, maka jelas pada masa revolusi fisik kekuatan fisik dan kemampuan mengerahkan militansi massa menentukan segala-galanya. Tetapi dalam era pembangunan politik, bukan lagi kekuatan fisik semata-mata yang menentukan keunggulan. Unsur hasil pemikiran atau konsep dan kemampuan "menjualnya" kepada masyarakat serta kemampuan mengorganisasikan upaya lebih dibutuhkan daripada penggunaan kekuatan. Dengan jujur harus diakui, bahwa PKI-lah yang paling siap dengan konsep di berbagai bidang dan mampu menjualnya kepada semua aliran yang hidup di Indonesia pada waktu itu. Inilah salah satu faktor yang membawa kejayaan PKI di masa era pembangunan politik.

Dalam era Orde Baru mulai terasa adanya desakan untuk menata kehidupan bangsa Indonesia menurut jalur kemurnian Pancasila dan UUD '45. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya konsep, sistem dan tatacara untuk menjabarkan dan mengimplementasikan apa yang sebelumnya terkandung dalam naluri perjuangan. Faktor waktu dan kendala *security* atau politik telah mengharuskan perlunya digunakan kekuasaan untuk merekayasa keadaan demi mensukseskan proses konsolidasi dan rehabilitasi menuju ke pematangan stabilitas nasional.

Apa yang berhasil dicapai selama era awal pembangunan ekonomi cukup mendasar. Selain pertumbuhan ekonomi dapat dipacu dan kebutuhan pokok rakyat sudah tercukupi, semua lembaga pemerintahan dan kenegaraan berhasil dibentuk sesuai dengan amanat UUD '45, antara lain pemerintahan kabinet presidensial, DPR, MPR, DPA, BPK, MA dan sebagainya. Demikian pula, aturan permainan dasar berhasil diletakkan untuk menata implementasi kehidupan demokrasi Pancasila, seperti Pemilu lima tahun sekali, pembentukan MPR dan DPR serta DPRD sesuai hasil Pemilu, pemilihan Presiden/Mandataris MPR dan Wakil Presiden oleh MPR setelah disusun GBHN, dan sebagainya.

Diberlakukannya keterbukaan dan kebebasan yang agak longgar akhir-akhir ini merupakan bukti bahwa jalan kehidupan bangsa Indonesia mulai bergerak meninggalkan kekuatan fisik, dan berangsur-angsur menuju ke arah yang dicita-citakan, di mana kekuatan fisik tidak lagi menjadi penentu keberhasilan. Semakin jauh kita bergerak meninggalkan kekuatan fisik sebagai faktor penentu, semakin menonjol pula tuntutan akan mutu kekuatan yang berinteraksi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agar mekanisme kehidupan demokrasi politik dan ekonomi dalam masyarakat sesuai dengan sistem nilai kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD '45, maka diperlukan tingginya mutu pelaku, unsur, sistem, tatacara dan budaya serta semua faktor yang mendukungnya. Selama ini sejarah telah menunjukkan bahwa tingkat kesiapan dari unsur pendukung menentukan tingkat implementasi cita-cita yang ingin dicapai. Tanpa penataan yang demikian, proses pencapaian cita-cita tersebut akan mengalami gejolak yang lebih bersifat destruktif daripada membuahkan

hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pandangan itu, maka dapat dikatakan bahwa situasi tahun 1993 yang bergantung dari hasil Pemilu 1992 akan ditentukan oleh mutu yang dicapai OPP dalam melaksanakan Pemilu dibanding dengan Pemilu sebelumnya. Tolok ukur keberhasilan peningkatan mutu OPP dalam Pemilu 1992 yang akan datang ialah tuntasnya konsolidasi intern parpol dan GOLKAR.

Keberhasilan itu ditandai oleh beberapa hal, antara lain mantapnya implementasi asas tunggal Pancasila dalam OPP. Ini antara lain berarti sudah tidak ada lagi visi yang berkaitan dengan ideologi primordial sebelumnya. Selain itu, secara organisatoris baik Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga setiap OPP harus sudah disesuaikan dengan pencantuman Pancasila sebagai asas OPP. Kedua, proses integrasi OPP sudah tuntas dengan hilangnya masalah unsur sebagai faktor pertimbangan dalam OPP. Misalnya dalam PDI tidak ada lagi fraksi, baik riil maupun aspiratif, yang bersumber dari PNI, Murba, Partai Katolik dan sebagainya. Di PPP tidak tampak lagi pertimbangan yang bersumber dari Perti, Parmusi dan sebagainya. Begitu juga di GOLKAR sudah tidak ada lagi visi MKGR, Kosgoro dan sebagainya. Hal ini tercermin dalam pembauran antara aspirasi, visi dan tunggalnya program yang diperjuangkan. Dengan demikian, mutlak adanya disiplin semua pemimpin OPP untuk mengabdikan diri kepada program yang telah disusun.

Logisnya, hal tersebut baru akan dapat dicapai bila program yang diperjuangkan setiap OPP adalah hasil dapur (*think tank*) masing-masing yang merupakan hasil diskusi terbuka. Demikian pula dalam kaitannya dengan program yang mereka kampa-

nyekan, setiap OPP hendaknya sudah mampu menawarkan calon Presiden/Mandataris yang mereka jagoi untuk diajukan dalam SUMPR yang akan datang. Dengan demikian, masyarakat calon pemilih sudah tahu apa program OPP dan siapa yang akan mereka percayai untuk melaksanakannya. Ini adalah bagian penting dari pendidikan politik bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilih mereka.

Tolok ukur ketiga adalah kemampuan OPP untuk menerapkan prinsip dan prosedur praktek demokrasi dalam menyusun pengurus dan mengelola organisasi masing-masing. Kesan adanya rekayasa dari atas dan proses "top down" dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan organisasi harus sudah sirna. Sebaliknya yang harus dibudayakan dalam praktek dan dalam membina kader pemimpin setiap OPP sekarang ini adalah proses "bottom up".

Setiap OPP juga harus sudah dapat mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan GBHN selama lima tahun pemerintahan yang lampau. Selain itu, OPP juga harus mengantisipasi dan mengemukakan persepsi tentang perkembangan keadaan menjelang Abad XXI. Dengan demikian setiap OPP akan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pemilih tentang butir-butir yang akan mereka perjuangkan untuk mengisi GBHN bagi rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun yang akan datang. Selain itu, setiap OPP harus menginventarisasikan permasalahan yang dihadapi bangsa, dan daftar hasil serta kegagalan pelaksanaan GBHN selama lima tahun yang sudah berjalan diperlukan untuk dibekalkan kepada para anggota MPR baru, guna melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban Mandataris yang akan diberikan dalam SUMPR.

Di atas itu semua yang terpenting adalah

setiap OPP dapat mendemonstrasikan praktek budaya politik yang bermoral tinggi berdasar norma dan etika yang bersumber pada Pancasila. Praktek ini akan menentukan apakah kampanye dan Pemilu menjadi sarana demokrasi yang dewasa dan bermanfaat bagi kesinambungan perjuangan bangsa atau menjadi ajang saling mendiskreditkan dan forum agitasi yang menjurus pecahnya persatuan dan memancing anarki. Rakyat perlu dididik bahwa politik bukan lagi ajang untuk adu kekuatan, melainkan forum untuk meningkatkan kesadaran politik melalui adu argumentasi. Ini akan mendorong minat rakyat untuk menilai pemerintah dan birokrasi pemerintah serta lembaga negara lainnya dalam mengelola kepentingan mereka.

Selain itu, yang menjadi tantangan terbesar bagi OPP ialah kemampuan untuk dapat mengungkapkan kegagalan, kekeliruan, kesalahan, penyelewengan, dan ketidaksesuaian pelaksanaan GBHN dalam periode yang lalu tanpa mengundang emosi dan antipati, apalagi frustrasi dan dendam. Mereka dituntut agar mampu menjelaskannya secara obyektif dan lugas demi menghindari salah tafsir; mereka juga harus mampu memberikan alternatif jalan keluar berbagai faktor penghambat. Demi-

kian pula, mereka perlu mengemukakan keberhasilan tanpa disertai rasa puas diri dan melecehkan kekurangan serta kegagalan.

Setiap kali seseorang berdiri di tengah massa yang mengelu-elukannya, ia mudah terperangkap oleh psikologi massa dan cenderung untuk beragitasi. Padahal untuk meningkatkan mutu substansial kampanye dan Pemilu yang akan datang bukannya agitasi yang diperlukan, melainkan kemampuan untuk mendemonstrasikan kepemimpinan yang bermutu dan keberanian untuk mengungkapkan dengan gamblang masalah yang dihadapi bangsa, memberikan alternatif yang masuk akal untuk memecahkan masalah dan menawarkan program yang realistik.

Komposisi calon-calon anggota DPR/MPR dari semua fraksi yang akan datang semestinya merupakan perimbangan antara politisi dan teknokrat, agar mereka dapat dijadikan "sparing partner" yang tangguh bagi pemerintah.

Perlu diingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa serta hasil perjuangan yang telah kita capai harus tetap dijaga sebagai modal dasar untuk melanjutkan perjuangan nasional.